

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Tentang Pemahaman Nasabah di BMT al-Amin  
Jalan Pasir Putih Kelurahan Simpang Tiga  
Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE.Sy)



**OLEH**

**DESI INDRIYANI**

**NIM: 10825003714**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2013**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di BMT al-Amin adapun permasalahan yang diteliti yaitu berjudul tentang “PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS TENTANG PEMAHAMAN NASABAH DI BMT AL-AMIN JALAN PASIR PUTIH KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKIT RAYA PEKANBARU)”. Latar belakang penulis mengambil judul ini bertujuan untuk mengetahui Pemahaman nasabah BMT al-Amin tentang pembiayaan mudharabah, dan apa saja solusi jika terjadi kendala pada pembiayaan mudharabah di BMT al-Amin, dan bagaimana sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT al-Amin. Pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BMT al-Amin tersebut seperti nasabah pembiayaan mudharabah dalam pengelolaan modal kerja salah satunya dalam membuka usaha. Dimana sahibul maal memberikan amanah kepada Mudharib untuk mengelola modal kerja tersebut dan hasil yang didapati dari modal kerja tersebut dibagi hasil antara sahibul maal dan mudharib sesuai dengan akad perjanjian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di BMT al-Amin jalan pasir putih kelurahan simpang tiga kecamatan bukit raya Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara), dokumentasi, kuesioner (angket), dan observasi. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nasabah yang menggunakan pembiayaan mudharabah di BMT al-Amin Pekanbaru, data skunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil kegiatan di BMT al-Amin yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Analisa data yang digunakan adalah variabel terikat dan variabel bebas dan tehnik penulisan yang digunakan adalah deduktif dan induktif dan deskriptif.

Hasil penelitian adalah Pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada 6 hal yang dijadikan tolak ukur penelitian oleh peneliti dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman nasabah mengenai pembiayaan mudharabah dan bagaimana konsep akad pada pembiayaan

mudharabah, laporan perkembangan hasil usaha nasabah setiap bulan, pemahaman mengenai sistem pengelolaan modal, pemahaman mengenai perhitungan penentuan bagi hasil, dan pemahaman bagaimana solusi yang ditempuh ketika terjadi kendala.

Bahwa adanya ketidak pahaman nasabah mengenai maksud dan prosedur dalam akad pembiayaan mudharabah ini menurut peneliti bisa menimbulkan kendala antara pihak BMT dengan nasabah. Hal ini dikarenakan ketidak pahaman nasabah akan menimbulkan perbedaan persepsi antara pihak BMT sebagai *shahibul mal* dengan pihak nasabah selaku mudharib.

Bahwa tidak semua nasabah mengerti mengenai prosedur penyelesaian apabila terjadi kendala antara pihak BMT dengan nasabah. Sebagian nasabah tidak memahami bahwa akad yang dilakukan menimbulkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak. Sebagian nasabah mempunyai persepsi bahwa penyelesaian sengketa cukup hanya dengan jalan damai saja seperti yang dilakukan selama ini, dan tidak memperhatikan bahwa di dalam akad telah pula disebutkan bahwa penyelesaian kendala dilakukan di Pengadilan Agama.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan ni'matnya iman, Islam, dan ukhuwah.

Penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS TENTANG PEMAHAMAN NASABAH DI BMT AL-AMIN JALAN PASIR PUTIH KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKIT RAYA PEKANBARU)”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE,sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, sarana dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama pada:

1. Ayahanda Acun Basuni, dan Ibunda Atikah tercinta yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik Ananda selama ini sehingga sampai pada perguruan tinggi, kasih sayangmu tak akan pernah terbalaskan.

2. Saudara kandung, Wahyudin, Amd (Abang), Jamalludin, Amd (Abang) ,  
Usep saifudin, Amd (Abang) dan Neng fitriyani,S.Pdi (Kakak).  
Terimakasih atas segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan.
3. Bapak Prof. Dr. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta  
pembantu Rektor.
4. Bapak Dekan Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd beserta Wakil Dekan I, II, III  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Drs.H. Johari M.A sebagai pembimbing, terimakasih atas motivasi,  
waktu, tenaga, ilmu serta telah memberikan arahan, memperbaiki dan  
menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah  
mengorbankan waktunya untuk memberikan bimbingan penulis sehingga  
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya MA,  
selaku ketua jurusan dan Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam yang selalu  
membantu dan meluangkan waktunya dalam memberikan semangat untuk  
penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dra, H.j, Nurhasanah MA, selaku Penasehat Akademis, terima kasih  
atas waktu, Ilmu, dan motivasi yang telah diberikan.
8. Ibu Nurmala, S. Ag, selaku manager, Bapak Ali wardana, S.E.I, selaku  
bagian keuangan & kasir, Bapak Dalex, SH, selaku bagian pembiayaan  
dan pembukuan di BMT al-Amin yang telah berpartisipasi dan  
memberikan kontribusinya dalam memperoleh informasi, data-data dan  
telah meluangkan waktunya kepada penulis hingga terselesainya skripsi  
ini.

9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh segala data yang diperlukan untuk skripsi ini.
10. Pimpinan Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
11. Serta sahabat - sahabat ku dan rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa/I Ekonomi Islam khususnya Ei-5 dan juga teman-teman penulis semuanya yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis terima kasih atas motivasi dan do'anya.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, hanya do'a yang dapat penulis berikan semoga kita semua selalu diberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita akan terus berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan kita terutama dari sudut pandang ekonomi Islam dalam perbankan syariah.

Wassalam

Pekanbaru, Juni 2013

DESI INDRIYANI

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

### PENGESAHAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II GAMBARAN UMUM BMT AL-AMIN PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya BMT al-Amin Pekanbaru.....	15
B. Visi, Misi, BMT al-Amin Pekanbaru .....	17
C. Tujuan BMT al-Amin Pekanbaru.....	18
D. Strategi Operasional BMT al-Amin Pekanbaru .....	18
E. Struktur Organisasi BMT al-Amin Pekanbaru.....	20
F. Produk-Produk BMT al-Amin Pekanbaru .....	31

### **BAB III      KERANGKA TEORI**

A. Pengertian Mudharabah .....	36
B. Landasan Hukum Mudharabah .....	43
C. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	44
D. Macam-Macam Mudharabah .....	45
E. Manfaat dan Resiko Mudharabah .....	46

### **BAB IV      HASIL PENELITIAN**

#### **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

#### **DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

#### **(Studi Kasus Tentang Pemahaman Nasabah di BMT al-Amin Pekanbaru)**

A. Konsep Akad Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT al-Amin Pekanbaru Meliputi .....	48
1. Pemahaman Nasabah Pada konsep Akad Pembiayaan Mudharabah.....	59
2. Akad Pembiayaan Mudharabah .....	64
3. Jaminan Pembiayaan Mudharabah.....	64
B. Pemahaman Nasabah Tentang Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT al-Amin Pekanbaru .....	65
C. Solusi Ketika Terjadi Kendala Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT al-Amin Pekanbaru.....	70
D. Tinjauan Ekonomi Islam Pada Pembiayaan Mudharabah .	77



## **BAB V        PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 80

B. Saran..... 82

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dizalimi. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*antaraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan.

Salah satu kritik Islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip *al kharaj bi al dhaman* (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip *al ghunmu bi al ghurmi* (untung muncul bersama resiko). Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal.<sup>1</sup>

Oleh karenanya mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu

---

<sup>1</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 20003), Edisi. I Cet. Ke-I, h. 40.

diharamkan. Disini bank konvensional menuntut mendapatkan untung yang *fixed and predetermined* tetapi menolak untuk menanggung resikonya (*al ghunmu bi laa ghurmi / againing return without being responsible for any risk*). Bank konvensional mengharapkan hasil usaha, tetapi tidak bersedia menanggung biayanya (*al kharaj bi laa dhaman / gaining income without being responsible for any expenses*). Padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam teori keuangan, yakni prinsip bahwa return selalu beriringan dengan resiko (*return goes along with risk*).<sup>2</sup>

Di Indonesia maupun di Dunia Islam terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh *minding* yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut “lintah darat”.

Tetapi aliran yang melahirkan ide bank Islam berpendapat bahwa bunga bank itu tetap riba. Akan tetapi keberadaan bank sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang, bahkan diperlukan. Sehingga menjadi sebuah kewajiban, atau mungkin keharusan jika lembaga keuangan syariah yang muncul memberikan warna baru yang lebih menawarkan keadilan, baik kepada pemilik modal ataupun peminjam (pengusaha).

Sebagai sebuah alternatif, bank (lembaga keuangan) syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem kerja bank konvensional, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, dimana harus diciptakan bank (lembaga keuangan) syariah yang tidak

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 43.

bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil, antara lain yang dikenal dalam *fiqh mu'amalah* sebagai transaksi *mudharabah* atau *qiradh*.<sup>3</sup>

Begitu juga yang dikenal dalam bank (lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan). Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>4</sup>

Salah satu pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan *mudharabah*.

Menurut Muhammad pembiayaan *mudharabah* adalah kerja sama yang mana *sohibul maal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian. Ketentuan umum yang berlaku dalam pembiayaan *mudharabah* adalah jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Al jaziri. *Kitab al-fiqh 'ala mazahib al- arba'ah*, juz III, (Beirut: Dar al- fikr, 1990), h. 34.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001), Cet. Ke -I, h. 160.

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), Edisi Revisi, h. 98.

Secara umum para fuqaha mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan sejumlah modal tertentu dari seorang *sahib al mal* (penyandang dana) kepada *mudharib* (pengusaha) agar uang tersebut dapat dikelola dan jika ada keuntungan dibagi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan jika terjadi kerugian maka ditanggung uang modal itu oleh *sahib al- mal* dengan syarat-syarat tertentu.<sup>6</sup>

Suatu tindakan dapat disebut sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

Sebagai suatu perusahaan jasa, BMT al-Amin Pekanbaru merupakan suatu koperasi yang telah menjalankan kegiatan usahanya cukup lama yakni terhitung sejak berdirinya tahun 1996 sampai sekarang tahun 2013 telah berusia 17 tahun. Dengan usia tersebut diharapkan BMT al-Amin Pekanbaru mampu bertahan menjalankan usahanya secara efektif dan efisien dan berkembang secara baik dan signifikan dan sekaligus mampu meningkatkan aset kekayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umumnya. BMT al-Amin merupakan salah satu BMT dari beberapa BMT yang ada di Pekanbaru yang mampu bertahan dan tetap eksis pada kegiatan usahanya. Bahkan pada tahun 2006 yang lalu dari sekian banyak koperasi syariah BMT yang beroperasi di Pekanbaru hanya dua BMT yang dianggap memiliki perkembangan cukup baik,

---

<sup>6</sup> *Mudharabah* disebut juga *qiradh* atau *muqaradah*. Maka keduanya sama *Mudharabah* adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *qiradh* digunakan oleh masyarakat Hizaz (Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 2 PT Raja Grafindo, Jakarta).

sehingga layak mendapat pinjaman lunak dari departemen koperasi dan UMKM RI dalam pelaksanaan program dana bergulir syariah (DBS) tahun 2006 dan mendapatkan pinjaman lunak sebesar Rp. 500.000,000 dengan pola bagi hasil. Adapun kedua koperasi syariah BMT tersebut adalah kopsyah BMT al-Amin Pekanbaru dan kopsyah BMT Ittihad Rumbai.<sup>7</sup>

BMT al-Amin adalah salah satu BMT di jalan Pasir Putih Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, yang sebagaimana BMT pada umumnya berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selama ini BMT al-Amin dalam kaitannya dengan nasabah, telah melakukan dua kegiatan, yaitu menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*financing*). Adapun produk-produk menghimpun dana (*funding*) pada BMT al-Amin antara lain:

1. Tabungan *mudharabah*
2. Tabungan *Qurban*
3. Tabungan *Pendidikan*
4. Tabungan *Hari Raya*
5. Tabungan *Walimahan*
6. Tabungan *Haji dan Umrah*.<sup>8</sup>

Sedangkan produk-produk penyaluran dana (*financing*) antara lain:

1. Pembiayaan *Murabahah*
2. Pembiayaan *Mudharabah*
3. Pembiayaan *Musyarakah*

---

<sup>7</sup> Nurmala, S.Ag (manager), BMT al-Amin pekanbaru, wawancara, pekanbaru tanggal 8 maret 2013.

<sup>8</sup> Ali wardana, S.E.I (karyawan), BMT al- Amin Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2012.

#### 4. Pembiayaan *Qardhul Hasan*.<sup>9</sup>

BMT al-Amin salah satunya telah memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), yang sedapat mungkin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabahnya.

Berdasarkan obsevasi yang penulis lakukan di BMT al-Amin Pekanbaru efektifitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah masih belum sepenuhnya efektif, yang mana nasabah menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* data per 28 februari 2013 yang masih aktif menggunakan pembiayaan *mudharabah* sekitar 37 orang. Dan jumlah dana keseluruhan dari pembiayaan *mudharabah* per 28 februari 2013 adalah Rp. 158.955.384,. Para nasabah tersebut sebelumnya telah diberikan pemahaman tentang menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* baik melalui karyawan atau melalui brosur-brosur dari BMT, namun dalam penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah masih didapat kesenjangan dalam pelaksanaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah untuk meningkatkan nasabah maupun BMT itu sendiri.

maka penelitian ini dibuat guna mencari solusi alternatif bagi permasalahan tersebut, serta untuk mengetahui apakah ada kendala dalam produk *mudharabah* baik dari segi pemahaman maupun kendala lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Beranjak dari latar belakang penelitian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul :

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

**Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah DiTinjau Menurut Ekonomi  
Islam (Setudi Kasus Tentang Pemahaman Nasabah Di BMT al-Amin Jalan  
Pasir Putih Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru)**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang  
Dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi masalah ini pada  
Pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang meliputi pemahaman nasabah tentang  
bagaimana konsep akad, dan pemahaman perhitungan bagi hasil serta solusi  
ketika terjadi kendala pada pembiayaan *mudharabah* .

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, persoalan yang akan  
dibahas adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah tentang  
pemahaman nasabah yang meliputi:

1. Bagaimana konsep akad pada pembiayaan *mudharabah* di BMT al-Amin Pekanbaru?
2. Bagaimana pemahaman nasabah tentang perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT al- Amin Pekanbaru?
3. Bagaimana solusi ketika terjadi kendala pada pembiayaan *mudharabah* di BMT al-Amin Pekanbaru ?



#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui konsep akad pada pembiayaan *mudharabah* di BMT al-Amin Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui pemahaman nasabah tentang perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT al-Amin Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui solusi ketika terjadi kendala pada pembiayaan *mudharabah* di BMT al-Amin Pekanbaru.

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Manfaat Akademik**

###### **1) Bagi institusi pendidikan**

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai pembanding penemuan-penemuan peneliti terdahulu tentang pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan *mudharabah* dari BMT .

###### **2) Bagi penulis lain**

Dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian dan dasar atau acuan penelitian lain.

###### **b. Manfaat Sosial**

###### **1) Bagi BMT**

Masukan bagi BMT untuk bahan pertimbangan melakukan peningkatan kinerja dan srategi dalam pemberian fasilitas pembiayaan *mudharabah* bagi nasabahnya.

## 2) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang pemahaman nasabah mengenai konsep akad pembiayaan *mudharabah* serta *nisbah* bagi hasilnya dan kemungkinan timbulnya kendala berkaitan dengan akad pembiayaan *mudharabah*.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor BMT al-Amin yang berlokasi di Jalan Pasir Putih No 19 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.

Dipilihnya lokasi ini karena BMT al-Amin merupakan BMT yang terus mengalami perkembangan positif sampai saat ini terutama dalam hal permintaan pembiayaan (kredit) modal kerja usaha kecil bagi pengusaha kecil yang ada di kota Pekanbaru pada umumnya dan kecamatan Bukit Raya pada khususnya.

### 2. Subjek dan Objek penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah para nasabah yang menggunakan jasa dana pembiayaan *mudharabah* BMT al-Amin Pekanbaru
- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* tentang pemahaman nasabah di BMT al-Amin Pekanbaru

### 3. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah seluruh nasabah yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* di BMT al-Amin Pekanbaru yaitu sebanyak 37 orang nasabah.

Karena jumlah populasinya hanya 37 orang maka sekaligus dijadikan sampel dengan menggunakan teknik total *sampling*.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nasabah yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* di BMT al-Amin Pekanbaru.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil kegiatan di BMT al-Amin yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 5. Pengumpulan Data

#### a. Metode Interview

Adapun metode yang paling tepat untuk memperoleh data adalah dengan deep interview sebagai suatu tanya jawab lisan dimana 2 orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat yang lain dapat mendengarkan suara dengan telinganya sendiri. Ini merupakan pengumpulan informasi yang langsung mengenai beberapa jenis data.

b. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang diperoleh dengan sumber pada dokumentasi antara lain catatan, laporan tertulis serta akad perjanjian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari BMT al-Amin.

c. Kuesioner (angket)

Yaitu pertanyaan yang disusun secara tertulis untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden.<sup>10</sup> Responden yang akan dimintai angket adalah nasabah dan karyawan BMT al-Amin. Data yang diperoleh dari angket ini merupakan sumber data utama primer dalam penelitian ini.

d. Metode Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Metode penulisan

1) Deduktif

Yaitu mengungkapkan data-data umum yang berhubungan dengan masalah penelitian ini kemudian dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet.3, (Jakarta : PT Gramedia, 1977), h. 215.

## 2) Induktif

Yaitu dengan cara mengambil data yang bersifat khusus, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum

## 3) Deskriptif

Yaitu suatu uraian penulis yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi sedikitpun sesuai dengan keadaan sebenarnya

## 4) Pengolahan Data

Pada penelitian ini data yang diperoleh adalah data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik, atau sifat variabel. Sesuai dengan jenis data yang diperoleh dari penelitian tersebut maka teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik non statistik yakni pengolahan data dengan tidak menggunakan analisa statistik, melainkan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif pada penelitian ini dilakukan secara induktif yakni pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi yang khusus.

### b. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis bivariat yaitu analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan ini lebih terarah dan sistematis, maka diperlukan sistematika yang dibagi menjadi beberapa pokok bahasan.

Bab I Yang merupakan bab Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan..

BabII Mengemukakan gambaran umum mengenai BMT al-Amin Pekanbaru yang terdiri dari sejarah berdirinya BMT al-Amin Pekanbaru, visi dan misi, strategi BMT al-Amin Pekanbaru, struktur organisasi BMT al-Amin, dan produk-produk BMT al-Amin Pekanbaru.

Bab III Mengemukakan kerangka teori yang terdiri dari pengertian *mudharabah*, landasan hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, manfaat dan resiko *mudharabah*.

Bab IV Akan diulas pembahasan tentang hasil penelitian. Yang terdiri dari pemahaman nasabah BMT yang meliputi tentang konsep akad pembiayaan *mudharabah*, dan pemahaman nasabah tentang perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT, dan bagai mana solusi ketika terjadi kendala pada pembiayaan *mudharabah* di BMT, dan tinjauan ekonomi islam terhadap pembiayaan mudharabah.

Bab V Terdiri dari kesimpulan dan saran. Didalamnya disajikan ulang secara singkat beberapa jawaban atas permasalahan yang mendorong diadakannya penelitian ini.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BMT AL-AMIN PEKANBARU.**

#### **A. Sejarah Berdirinya BMT al-Amin Pekanbaru**

BMT al-Amin didirikan pada tanggal 11 Januari 1996 dengan modal awal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Prakarsa dilakukan di jalan Amaliyah No. 1 tepatnya di kediaman bapak Drs. Muhamad Ali Noer. Badan Pendiri beranggotakan:

1. Drs. Muhamad Ali Noer
2. M. C. Tarigan, S. Sos
3. Dallek, SH
4. Nurmala, S. Ag
5. Nasrun

Selanjutnya Badan Pendiri menunjukan Badan Pengelola untuk menjalankan kegiatan transaksi BMT sehari-hari yaitu:

1. M. C. Tarigan  
(Manajer merangkap bagian pembiayaan).
2. Dallek, SH  
(Bagian Pembukuan merangkap Teller dan Kolektor)
3. Nurmala, S. Ag  
(Bendahara rangkap bagian keuangan)

BMT al-Amin mulai beroperasi melalui izin Sertifikat Operasi Sementara (S. O. S) yang dikeluarkan oleh pusat Inkubasi Bisnis usaha Kecil (PINBUK) Pusat yang ditandatangani oleh Bapak Dr. Ir. H. M Amin Aziz selaku Direktur

Utama pada tanggal 12 Desember 1996 di Jakarta dengan surat nomor 0402001/PINBUK/XII/96 dengan nama:

Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) al-Amin.  
Dengan alamat : Jl. Amaliyah No. 1 Sei Sialang Desa baru, Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau.

Operasi BMT al-Amin diperkuat lagi dengan keluarnya Sertifikat Operasional BMT dari PINBUK Riau yang ditanda tangani oleh Hj. Azlaini Agus, SH selaku Direktur utama di Pekanbaru pada tanggal 1 April 2000 dengan surat nomor 03/ PINBUK/Riau/IV/2000.

Pada awalnya BMT al-Amin didirikan murni sebagai lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS), namun dalam perjalanannya dan melihat perkembangan yang ada maka BMT al-Amin mendaftarkan diri selaku Koperasi Syariah BMT al-Amin dengan Akta Pendirian yang disahkan oleh menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 12/BH/KDK46/1.2/IX/1998 tanggal 19 September 1998.

Legalitas Kopsyah BMT al-Amin, Selaku organisasi yang resmi maka sejak awal pendirian kopsyah BMT al-Amin telah beroperasi dengan legalitas atau badan hukum sebagai berikut:

1. Badan Hukum Pinbuk Pusat Nomor: 0402001/PINBUK/XII/96
2. Badan Hukum Koperasi Syariah BH. No. 12/BH/KDK. 46/1.2/IX/1998
3. Sertifikat Operasional Pinbuk Riau No. 03/PINBUK/RIAU/IV/2000

Selain legalitas diatas demi mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka kopsyah BMT al-Amin pekanbaru juga memiliki izin-izin usaha, antara lain:



1. Izin tempat usaha (situ) kota pekanbaru No. 2782/H/UPT/WEKA-2003
2. SIUP kota Pekanbaru No. 1115/Dinas 04.01/USDAG/XII/2003
3. TDP. Koperasi No. TDP. 040125200398
4. NPWP No. 02.327.274.3-211.00.<sup>1</sup>

## **B. Visi, Misi BMT al-Amin Pekanbaru**

### **1. Misi BMT al-Amin Pekanbaru**

Menjadikan BMT al-Amin sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berlandaskan syariah islam yang mandiri, mengakar dan sehat, dari, oleh dan untuk masyarakat dalam rangka mewujudkan muslim Kaffah.

### **2. Visi BMT al-Amin Pekanbaru**

- a. Menjadikan BMT al-Amin sebagai lembaga silaturrahim dibidang pengembangan ekonomi,moral dan spiritual ummat.
- b.Menghimpun potensi ekonomi ummat Islam sehingga dapat diberdayakan secara lebih luas.
- c.Memberdayakan usaha-usaha kecil melalui pembiayaan dan pembinaan berkelanjutan, menuju kemandirian dan kesejahteraan
- d.Memberdayakan kaum Fakir Miskin dalam bentuk usaha-usaha produktif.<sup>2</sup>

## **C. Tujuan BMT al-Amin Pekanbaru**

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya

---

<sup>1</sup> BMT al-Amin Pekanbaru, *Dokumentasi sejarah BMT al-Amin*, Tahun 2012, h. 1-2.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 41.

2. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menyimpan.
3. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota
4. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif kaum Dhu'afa (Fakir Miskin), menuju umat yang berkualitas dan sejahtera

Adapun sasaran BMT al-Amin adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah menuju muslim kaffah.<sup>3</sup>

#### **D. Strategi Operasional BMT al-Amin Pekanbaru**

Sebagai lembaga keuangan yang memadukan dua sisi yang berbeda yaitu *Baitul Maal (social oriented)* dan *Baitutamwil (Profit Oriented)* yang dikelola dengan berlandaskan syari'at Islam yang berlaku secara universal tidak terbatas pada ruang dan waktu serta didukung oleh IT yang tangguh akan menjadi” model usaha generasi masa depan” menggantikan system kapitalis dan orientalis yang ada sekarang ini.

Strategi bisnis dengan sistem bagi hasil yang diterapkan BMT al-Amin akan menebarkan rasa keadilan bagi setiap nasabah, berbeda dengan system kapitalis yang meraih keuntungan dari modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (prinsip ekonomi) membuka peluang ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan (kelompok minoritas akan menguasai yang mayoritas seperti yang terjadi pada saat sekarang ini).

Adapun strategi untuk mencapai tujuan BMT al-Amin Pekanbaru adalah membangun kehidupan ekonomi umat dengan pola syariah, menghindarkan sitem

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 7.

ekonomi dan keuangan dari praktek ribawi, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Untuk ketiga tujuan tersebut diatas, BMT al-Amin Pekanbaru menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Basis Anggota (*jami'ah*)

BMT al-Amin Pekanbaru melakukan pengembangandan penguatan basis masa keanggotaan, meningkatkan kualitas dan loyalitas anggota, membina yang kecil dan bermitra dengan yang besar. Sebab dengan jumlah yang banyak dan berkualitas serta memiliki loyalitas yang kuat, meskipun kecil niscaya akan mampu memberikan akumulasi ekonomi yang besar dan relative lebih stabil.

2. Kemitraan Pelanggan (*silaturahmi*)

Untuk memenangkan persaingan, BMT al-Amin Pekanbaru telah memilih strategi dengan menjalin atau membangun komunikasi bisnis dan sosial, memperbanyak *silaturahmi*, hubungan yang baik dan kemitraan, baik sebelum dan sesudah menjadi nasabah atau anggota, karena dengan kedekatan dan kehangatan bermitra akan tercipta hubungan bisnis secara transparan dan adil, sehingga kepuasan nasabah dapat tercapai.

3. Proaktif (*ruhul jaded*)

BMT al-Amin Pekanbaru selalu proaktif dan progresif terhadap perkembangan bisnis dan sosial, selalu berkreasi dalam persaingan, dan inovatif dalam produk maupun strategi bisnis.

#### 4. Penguatan Jaringan (*ukhuah*)

BMT al-Amin Pekanbaru terus mengembangkan usaha, baik secara internal maupun eksternal melalui pembukaan jaringan (cabang-cabang baru).

#### 5. Mengembangkan Sumber Daya Insani (*tarbiah*)

BMT al-Amin Pekanbaru secara terus menerus dan berkesinambungan dalam membangun keyakinan bahwa bekerja merupakan ibadah dan jihad ekonomi islam. Peningkatan sumber daya insani ini dibangun pada semua aspek, sikap, wawasan, dan keterampilan dengan mekanisme proses belajar tiada henti.<sup>4</sup>

### **E. Struktur Organisasi Kopsyah BMT al –Amin Pekanbaru**

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*), atau pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit atau bagian yang ada pada suatu organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam hal ini perlu adanya kerja sama antara tim satu dengan tim yang lainnya. Sehingga dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan utama dari perusahaan yang bersangkutan.

Setiap satuan organisasi harus dimengerti akan fungsi tugas dan tanggung jawabnya, serta mengetahui hubungan satu sama yang lain diantara masing-masing satuan dan wewenang yang didelegasikan kepada masing-masing satuan.

Selaku kelompok suwadaya masyarakat dan berbadan hukum koperasi, BMT al-amin Pekanbaru juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 8.

pendiri, pengurus dan pengelola. Dalam undang-undang koperasi bahwa syarat berdirinya suatu koperasi harus dihadiri sekurang-kurangnya 20 orang anggota badan pendiri sekaligus sebagai pemegang saham atau modal dasar koperasi, namun karena pada awalnya Kopsyah BMT al-Amin berbentuk LKMS (lembaga keuangan mikro syariah) maka badan pendiri hanya ditetapkan sebanyak 5 orang. Sedangkan jumlah pengurus adalah sekurang-kurangnya 3 orang termasuk perwakilan dari badan pendiri. Untuk pengelola sekurang-kurangnya 3 orang di luar dari pengurus dan pendiri.<sup>5</sup>Namun demikian, struktur organisasi dalam setiap BMT al-Amin terdiri :

---

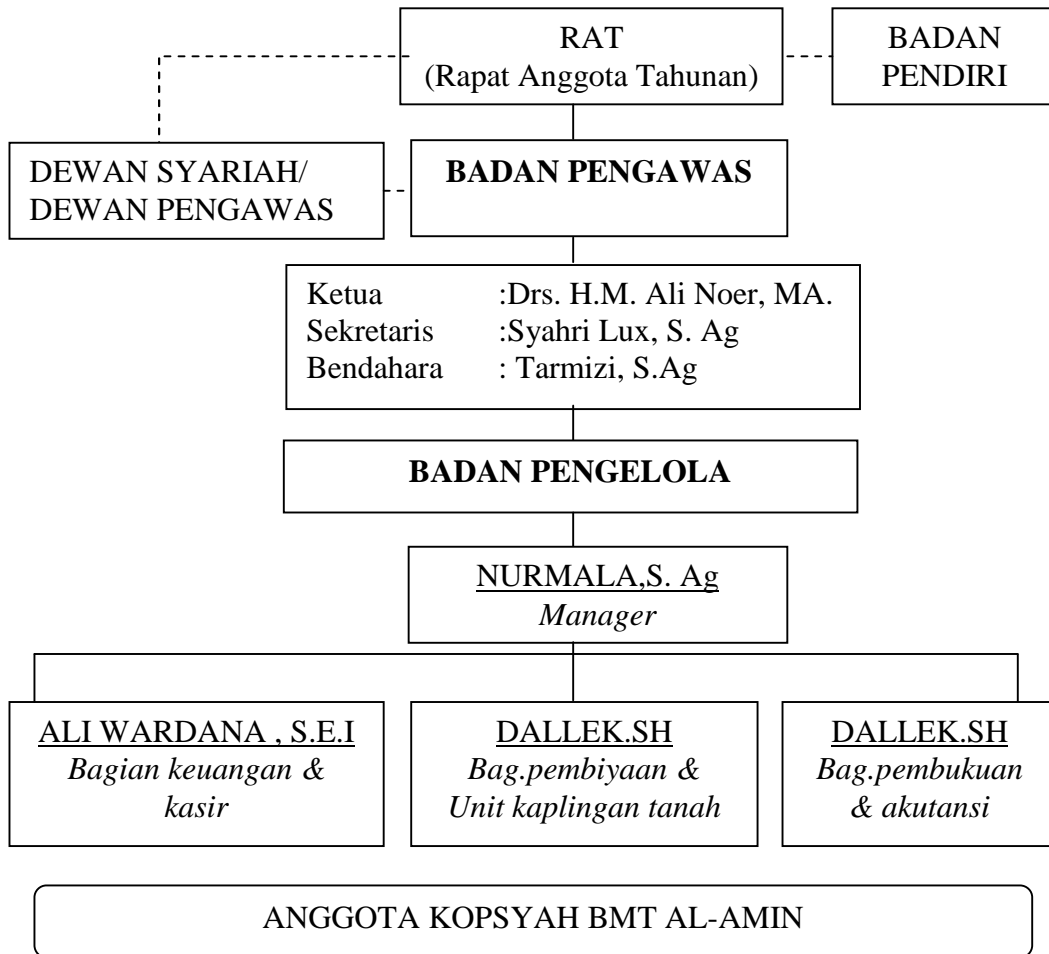
<sup>5</sup> *Ibid*, h. 14.

**GAMBAR II.I**

**STRUKTUR ORGANISASI**

**KOPSYAH BMT AL-AMIN PEKANBARU**

**TAHUN 2012**



----- = Garis koordinasi

————— = Garis Komando/Perintah.<sup>6</sup>

Sumber dari BMT Al-Amin Pekanbaru

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi tersebut adalah:

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 21.

## 1. RAT (Rapat Anggota Tahunan):

a. Musyawarah ini dilaksanakan setiap tahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT dan oleh karenanya berhak memutuskan :

- 1) Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi
- 2) Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, baik pengawas syariah maupun manajemen
- 3) Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun
- 4) Penetapan visi dan misi organisasi
- 5) Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya
- 6) Pengesahan rencana program kerja tahunan.<sup>7</sup>

## 2. Dewan Pengawas Syariah:

a. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama tersebut meliputi :

- 1) sebagai penasehat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan produk.
- 2) sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Propinsi.
- 3) mewakili anggota dalam pengawasan syariah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 22.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 23.

### 3. Badan Pengurus:

a. Badan Pengurus BMT pada hakekatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya. Amanah ini nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya. Masa kerja pengurus sangat tergantung pada kepentingan organisasi. Artinya BMT dapat menetapkan masa kerjanya 2, 3, 4 atau 5 tahun. Secara umum fungsi dan peran serta tanggungjawab pengurus dapat dirumuskan sebagai berikut

#### 1) Perencanaan

Badan pengurus berfungsi menyusun perencanaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, baik keuangan maupun non keuangan, sehingga diperlukan pengurus yang memiliki wawasan luas, pengetahuan, dan pengalaman bisnis, serta rasa optimis yang tinggi.

#### 2) Personifikasi badan hukum

Badan Pengurus merupakan personifikasi BMT baik dimuka maupun diluar pengadilan sesuai dengan keputusan musyawarah anggota. Pengurus pula yang paling bertanggungjawab terhadap pelaksanaan AD/ART organisasi.

#### 3) Penyediaan sumber-sumber yang diperlukan

Badan Pengurus harus mengusahakan berbagai sumber (resources) yang diperlukan agar BMT dapat berjalan dengan baik.

#### 4) Personalia

Badan pengurus pada dasarnya memegang kuasa atas jalannya BMT, namun karena keterbatasan tenaga kerja dan waktu, pengurus dapat



mengangkat wakilnya si pengelola. Namun hal ini tidak mengurangi sedikitpun tanggungjawabnya.

#### 5) Pengawasan

Karena pengurus telah menunjuk pengelola dalam menjalankan operasional rutin, maka fungsi pengurus terpenting berada pada fungsi pengawasan. Fungsi melekat pada semua lini kepengurusan. Baik secara bersama-sama maupun perbidang, pengurus harus melakukan fungsi ini secara berkala.<sup>9</sup>

#### 4. Badan Pengelola :

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus dalam menjalankan fungsi operasional keseharian. Ia bertanggungjawab kepada pengurus dan jika diminta dapat memberikan penjelasan kepada anggota dalam musyawarah anggota. Satuan kerja pengelola dipimpin oleh manajer atau direktur diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam musyawarah tahunan. Namun demikian, pengurus dapat mengusulkan diadakan musyawarah bersama pengawas untuk memberikan dan mengganti direksi atau manajer, jika nyata-nyata manajer /direktur telah melanggar aturan BMT.

Satuan kerja pengelola dapat terdiri minimal : manajer, pembukuan, marketing dan kasir. Dalam tahap awal dan dalam permodalan yang masih sangat terbatas, fungsi pemasaran dapat

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 23.

dirangkap oleh manajer, sehingga strukturnya hanya terdiri dari manajer, kasir dan pembukuan.<sup>10</sup>

5. ketua:

- a. Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
- b. Memimpin Rapat bulanan Pengurus dengan Manajemen menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT.
- c. Melakukan pembinaan kepada pengelola.
- d. Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan BMT.
- e. Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT, khususnya mengenai pencapaian tujuan.<sup>11</sup>

6. Sekretaris:

- a. Membuat serta memelihara Berita Acara yang asli dan lengkap dari rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
- b. Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada Anggota sebelum rapat diadakan.
- c. sesuai dengan ketentuan AD/ART.
- d. Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelola.
- e. Memverifikasikan dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT.<sup>12</sup>

7. Bendahara:

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 24.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 26.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 27.

- a. Bersama manajer operasional memegang rekening bersama (*counter sign*) di Bank terdekat.
- b. Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.<sup>13</sup>

#### 8. Manager:

- a. Ia merupakan struktur pengelola yang tertinggi oleh karenanya ia yang paling bertanggungjawab terhadap operasional BMT ;
- b. Manajer berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan;
- c. Ia dapat juga mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan karyawan ;
- d. Ia juga melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja karyawan ;
- e. Manajer melaporkan kinerjanya kepada pengurus dalam periode waktu tertentu minimal enam bulan sekali.<sup>14</sup>

#### 9. Pembukuan :

- a. Staf khusus pembukuan sedapat mungkin diangkat dari mereka yang memahami masalah akuntansi keuangan syariah;
- b. Bagian ini berfungsi membuat laporan keuangan yang minimal meliputi : laporan neraca, laba rugi, dan perubahan modal dan arus kas;

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 29.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 31.

- c. Ia dapat memberikan masukan kepada manajer terutama yang berkaitan dengan penafsiran atas laporan keuangan.
- d. Bagian ini juga berfungsi memberikan laporan perkembangan arus kas pembiayaan dan penghimpunan dana pada setiap periode seperti harian, mingguan, atau bulanan.
- e. Bagi organisasi yang sudah berkembang, dapat membentuk unit administrasi tersendiri yang meliputi bagian administrasi pembiayaan, dan bagian administrasi tabungan.
- f. Bagian administrasi pembiayaan akan berfungsi menyediakan berbagai kelengkapan untuk realisasi pembiayaan, dokumentasi, serta informasi berbagai hal tentang kondisi pembiayaan tersebut. Ia juga berfungsi mencatat angsuran supaya sesuai antara kartu angsuran yang dibawa nasabah /anggota dengan catatan BMT.
- g. Bagian administrasi tabungan akan berperan dalam penyiapan buku tabungan bagi anggota baru, pencatatan saldo pada kartu monitoring, pemindahbukuan bagi hasil, serta catatan atas perilaku anggota penabung termasuk jadwal pengambilan tabungan dan informasi deposito jatuh tempo dan pengambilan tabungan besar.<sup>15</sup>

#### 10. Marketing /Pemasaran :

- a. Bagian ini menjadi ujung tombak BMT dalam merebut pasar;
- b. berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran meliputi: segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/nasabah;

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 34.

- c. Bagian ini juga berfungsi untuk melakukan analisis usaha anggota /nasabah calon peminjam;
- d. Menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan;
- e. Menjemput simpanan dan tabungan anggota ;
- f. Dalam keadaan tertentu (pada tahap awal dan modal masih terbatas) fungsi marketing dapat dirangkap oleh manajer/direktur;
- g. Bila organisasi yang sudah berkembang, bagian marketing dapat dibagi menjadi bagian *funding* atau menghimpun dana, dan *financing* atau pembiayaan. Selanjutnya pada bagian *funding* dapat terdiri dari *funding officer-funding officer* dan pada bagian *financing* dapat terdiri dari *account officer-account officer*. Kedua bagian ini dipakai oleh kepala bagian marketing.<sup>16</sup>

#### 11. Kasir /Teller :

- a. Bagian ini merupakan yang berkaitan langsung dengan bagian keuangan;
- b. Pada setiap hari, kasir harus melakukan pembukuan dan penutupan kas;
- c. Bagian ini bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta menerapkannya dalam catatan uang keluar dan masuk;
- d. Staf khusus pada kasir harus terpisah dengan bagian pembukuan;
- e. Pada tahap awal staf kasir dapat berfungsi ganda yaitu sebagai fungsi pelayanan nasabah atau anggota;

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 35.

f. Namun pada perkembangannya dapat dibentuk staf khusus yang akan menangani masalah jasa pelayanan anggota. Bagian ini merupakan bagian terdepan dari pelayanan BMT. Ia akan memberikan penjelasan secukupnya terhadap berbagai hal tentang BMT kepada calon anggota nasabah.<sup>17</sup>

Dalam perkembangannya struktur organisasi BMT dapat dirubah dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pengembangannya struktur tersebut dapat menjadi :

- 1) Direktur
- 2) Manajer Operasional yang membawahi bagian kasir, pembukuan, bagian administrasi pembiayaan- tabungan dan bagian pelayanan nasabah /anggota.
- 3) Manajer Marketing yang membawahi bagian funding officer (FO), account officer (AO), dan remedial (penagihan).
- 4) Bagian pembukuan yang akan membawahi : internal audit dan staf pembukuan.

## **F. Produk dan Jasa BMT al- Amin Pekanbaru**

### **1. Unit Jasa Keuangan Syari'ah**

#### **a. Produk Tabungan.**

##### **1) Tabungan *Mudharabah***

Yaitu simpanan umum, yaitu simpanan dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 36.

dan BMT al-Amin Pekanbaru memiliki kewenangan penuh untuk mengelola sesuai dengan prinsip syariah. Atas produk ini penyimpan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan.

#### 2) Tabungan Haji dan Umrah

Simpanan yang digunakan khusus untuk persiapan menunaikan ibadah haji, pembayarannya dapat dilakukan harian atau mingguan, sedang pengambilannya ditentukan pada saat menjelang berangkat ibadah haji dan umrah.

#### 3) Tabungan Qurban

Simpanan ini khusus untuk pelaksanaan qurban dimana setorannya dapat dilakukan harian atau mingguan dan pengambilan dananya dilakukan pada waktu akan melakukan ibadah qurban.

#### 4) Tabungan Pendidikan

Simpanan pendidikan yang simpanannya digunakan untuk keperluan biaya pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sama halnya dengan simpanan yang lain, simpanan pendidikan inipun dapat dibayarkan secara harian atau mingguan tetapi pengambilannya hanya dapat diambil pada waktu saat menjelang kebutuhan yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan dan disesuaikan dengan kesepakatan sebelumnya.

#### 5) Tabungan Hari Raya

Simpanan ini digunakan untuk keperluan hari raya dimana setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, tetapi pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat hari raya.

#### 6) Tabungan Walimahan

Simpanan yang diperuntukkan untuk keperluan pernikahan atau walimahan, khitanan atau sejenisnya. Penyetorannya dapat disetor sewaktu-waktu baik secara harian maupun mingguan dan pengambilannya sewaktu menjelang walimahan.

#### 7) Tabungan Deposito (*wadiah*)

Dana yang di himpun dari anda (tabungan deposito) dikelola dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dan usaha rill BMT sesuai dengan prinsip syariah. Hasil yang diperoleh dari hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang ditetapkan. Estimasi keuntungan yang sebesar 1,6 % -2,0 % per bula, (ternyata melebihi Bank Konvensional)

### b. Produk Pembiayaan

#### 1) Pembiayaan *Mudharabah* (*mudarabah-musyarakah*)

Yaitu penyediaan modal usaha atas dasar kemitraan dan patungan modal (*musyarakah*) atau dapat juga semua permodalan dari BMT al-Amin Pekanbaru (*mudharabah*). Atas akad ini, BMT al-Amin Pekanbaru akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan proporsi (*nisbah*) yang disepakati.

#### 2) Pembiayaan Musyarakah

Kerja penyertaan modal dan masing-masing menentukan jumlahnya sesuai kesepakatan bersama yang digunakan untuk mengelola sesuatu usaha/proyek tertentu. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan. Kerugian



harus dibagi antara sama anggota secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyawarah akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan lah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Hal ini dapat dijadikan dasar dalam penentuan nisbah dimana anggota BMT sebagai pengelola usaha mendapatkan porsi yang lebih tinggi.

### 3) Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu penyediaan barang modal dan atau barang konsumtif oleh BMT al-Amin Pekanbaru kepada peminjam. Atas dasar akad ini BMT akan mendapatkan keuntungan yang besarnya dihitung atas dasar kesepakatan. Ada kalanya jual beli ini diawali dengan akad sewa beli (*ijarah*).

### 4) Pembiayaan *Al-Qord- Al Qordhul Hasan*

Yaitu peminjam kebajikan yang pokoknya harus kembali disebut *Al-Qord*. Sedangkan dana yang bisa tidak kembali disebut *Al-Qordhul Hasan*. *Al-Qord* sumber dananya dapat berasal dari dana produktif maupun sosial (ZIS), tetapi *Al-Qordhul Hasan* dananya hanya bersumber dari dana sosial (ZIS). Namun BMT al-Amin Pekanbaru baru mengembangkan produk *Al-Qord*. Atas akad ini BMT al-Amin Pekanbaru akan mendapatkan *fee* atau infaq yang besarnya tidak ditentukan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 37.

## 2. Unit Usaha Kopsyah BMT al-Amin Pekanbaru

Ada pun kegiatan usaha property yaitu sebagai berikut:

- a. pembangunan rumah dengan tipe RSH/36 Plus
- b. program rehap rumah yang sudah tidak layak huni
- c. Perkebunan

Adapun kegiatan perkebunan yaitu membuka lahan untuk membuat kebun kelapa sawit bagi anggota BMT al-Amin Pekanbaru

- 1) Unit Photo Kopy, ATK
- 2) Unit Wartel dan Ponsel
- 3) Unit Kaplingan Tanah :
  - a) Kaplingan kualu
  - b) Kaplingan Panam I, II dan III
  - c) Kaplingan Pasir Putih I
  - d) Kaplingan Pasir Putih II
  - e) Kebun Sawit.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 45.

### BAB III

#### KERANGKA TEORI

##### A. Pengertian Mudharabah

Kata *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “ suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.”<sup>2</sup> Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.<sup>3</sup>

Madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.<sup>4</sup> Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam

---

<sup>1</sup> Al-Mu’j m al-Wasit, *Al-juz’ al-awwal*, Cet III, (Kairo, Majma’ al-lughah al-Arabiyah), 1972.

<sup>2</sup> Ibn. Abidin, *Radd al-Mukht r ‘ala al-Durr al Mukht r*, juz IV, (Beirut: Dar Ihya al-Turas, 1987) h. 483.

<sup>3</sup> Al-Dasuqi, *Hasiyah al-Dasuqi’ala al-Sarh al-Kabir*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), h. 63.

<sup>4</sup> Al-Nawawi, *Riyad al-Salihin*, Vol.IV, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), h. 289.

jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>5</sup>

*Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.<sup>6</sup>

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang,<sup>7</sup> ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut Al Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.<sup>8</sup>

Dalam praktek *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke Nabi Muhammad saw ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-m l*) sedangkan Nabi Muhammad saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina, Vol.II, (Beirut : Dar al-Fikr,tt), h.509.

<sup>6</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, Ed.I.Cet. 1, Jakarta, Kencana, 2005,h.130

<sup>7</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-3, h..204.

<sup>8</sup> M. Anwar Ibrahim, “*Konsep Profit dan Loss Sharing System Menurut Empat Madzhab*”..

<sup>9</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqus Sunnah* (Terjemahan), Bandung, Al Maarif

Al Qur'an membolehkan *Mudharabah* ini dengan mengambil dasar QS.

Al Muzammil ayat 20



“ .....dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT “. <sup>10</sup>

Dalam ayat tersebut terdapat kata *yadribun* yang asal katanya sama dengan *mudharabah*, yakni *dharaba* yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.

Dan juga dalam Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ  
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاحْتِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib, r.a. bahwa r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :  
“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu : jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majjah no. 2289, kitab at-Tijarah). <sup>11</sup>

Menurut Antonio, *mudharabah* berasal dari kata *dharib*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis, al-*mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 990.

<sup>11</sup> Hafiz Abi Abdullah Muhammad Ibni Yajid Qajwiyani, *Sunan Ibnu Majjah Jilid II, Kitab At-Tijarah No. 2289 Bab Syirkah Wa Mudharabah*, (Bairut : Muhammad Fuad Abdul Bapi Juz II, 207-285 H), Cet. ke- 2, h. 768.

menyediakan 100 % modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>12</sup>

Sudarsono<sup>13</sup> mengatakan juga bahwa *mudharabah* berasal dari kata *adhdharbu fi asdhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *alqoth'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian *mudharabah* di atas maka akan dijelaskan mengenai pengertian *mudharabah* di BMT al-Amin Pekanbaru sebagai berikut :

#### 1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT untuk membantu modal usaha yang bersifat produktif.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 95.

<sup>13</sup> Sudarsono, *Bank*, h. .54-55.

<sup>14</sup> Karyawan bmt al-amin aliwardana.

Dalam pembiayaan Bank Syariah dan BMT, *mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko.<sup>15</sup> Bagian keuntungan yang disepakati itu harus berbentuk prosentase (*nisbah*) dan yang berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dari resiko bisnis dan bukan gara-gara kelalaian pengusaha, maka pemilik modal akan menanggung kerugian modal itu seluruhnya (100 %) dan pengusaha terkena kerugian dari kehilangan seluruh tenaga dan waktunya atau 0 % modal.<sup>16</sup> Pembagian kerugian ini didasarkan pada kemampuan menanggung kerugian masing-masing yang tidak sama.

Pada konsepnya, *mudharabah* menggunakan prinsip bagi untung rugi yang dianggap merupakan konsekuensi dari adanya ketidakpastian dalam kontrak investasi. Akan tetapi, menurut Abdullah Saeed, pada kenyataannya bank Islam (bank Syariah, istilah yang digunakan di Indonesia) hampir menghilangkan karakter ketidakpastian hasil usaha dalam kontrak *mudharabah*, melalui berbagai pertimbangan.<sup>17</sup>

Praktek kontrak *mudharabah* hampir sama dengan bisnis beresiko rendah atau bisnis yang tidak beresiko. Oleh karenanya penerapan transaksi *mudharabah* dalam perbankan Islam dinilai oleh Timur Kuran terdorong untuk

---

<sup>15</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta, Djambatan, 2001), h. 164-167.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 168.

<sup>17</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Penerjemah. M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003) h. 105.

menggunakan “bunga yang disamarkan (*thinly disguised interest*)” atau dengan kata lain bisa disebut dengan bunga yang direkayasa.

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya. Oleh karenanya pengelola BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Biasanya pembiayaan *Mudharabah* dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah pasti.  
yang serupa.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus di sepakati di awal perjanjian. Besar nya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak di atur dalam syariah, tetapi tergantung atas kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil dapat di bagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau porsi lain yang di sepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.<sup>18</sup>

Ada pun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* di terapkan untuk:

a. Pembiayaan modal kerja

Modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Berberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembayaran rekening listrik, air dan telfon, pembiayaan bahan baku, untuk pembiayaan upah buruh, untuk pembiayaan

---

<sup>18</sup> Ascarya , *akad & produk bank syariah*, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007 Cet. Ke-1, h. 62.



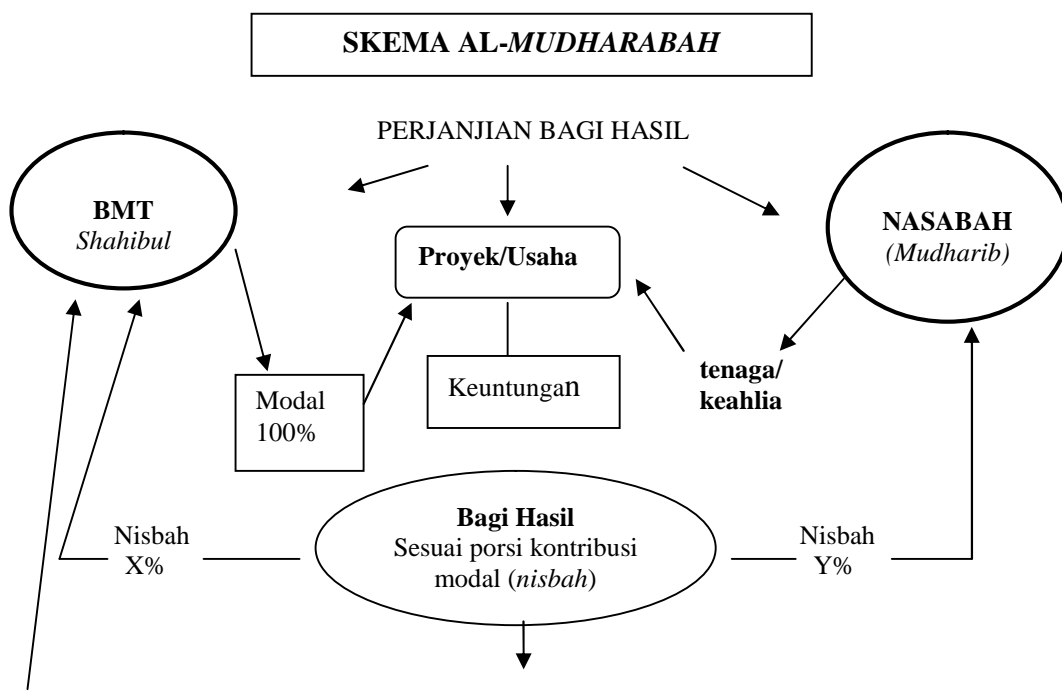
transportasi dan lain-lain. Sebagai contoh pada usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko, kelontongan dan sebagainya.

b. Investasi khusus

Di sebut juga *mudharabah* muqayadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Kebutuhan investasi secara umum dapat di penuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah*, sebagai contoh investasi ini dapat di salurkan untuk pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, perluasana usaha dan lain-lain.<sup>19</sup>

Secara umum, aplikasi Al- *Mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

GABAR III.II



<sup>19</sup> Ascarya, h. 125





"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. "(QS. Al-Maidah :I)

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

## 2. Berdasarkan al-hadits

Hadits tentang *mudharabah* juga terdapat pada hadits nabi riwayat ibnu majah, sebagai berikut:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَحْلَاطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untk keperluan rumah tangga.”(HR. Ibnu Majah No. 2289, Kitab At-Tijarah)<sup>22</sup>

## C. Rukun Dan Syarat Mudharabah

1. Penyediaan dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :

<sup>22</sup> Hafiz Abi Abdullah Muhammad Ibni Yajid Qajwiyani, *Sunan Ibnu Majah Jilid II, Kitab At-Tijarah No. 2289 Bab Syirkah Wa Mudharabah*, (Bairut : Muhammad Fuad Abdul Bapi Juz II, 207-285 H). Cet. ke-2, h. 768.

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisist menunjukkan tujuan kontrak (akad)
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>23</sup>

#### **D. Macam-Macam Mudharabah**

Secara umum, *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* (*Unrestricted Investment Account*) dan *mudharabah muqoyyadhah* (*Restricted Investment Account*).<sup>24</sup>

##### **1. Mudharabah Mutlaqah (bebas)**

*Mudharabah Mutlaqah* atau disebut dengan (*Unrestricted Investment Account*) adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan (*disrectionary right*) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.

##### **2. Mudharabah Muqoyyadah (terikat)**

Disebut juga dengan istilah (*Restricted Investment Account*) yaitu kerjasama dua orang atau lebih atau antara *shahibul maal* selaku investor dengan pengusaha atau *mudharib*, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lain

---

<sup>23</sup> *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional, untuk lembaga keuangan syariah* (jakarta, 2001, edisi pertama), h. 44-45.

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, (yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002, Edisi Revisi.

## E. Manfaat Dan Resiko Mudharabah

### 1. Manfaat *mudharabah*

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami negative spried.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati(*prudent*) mencari usaha yang benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bungan tetap berapapun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekaligus merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>25</sup>

### 2. Resiko *Mudharabah*

resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

---

<sup>25</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Teori dan Praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press dengan Tazkia Cendikia, 2001) h. 97-98

- a. *Side treaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang di sebutkan dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang di sengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid* h. 98

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**  
**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DITINJAU MENURUT**  
**EKONOMI ISLAM**  
**(Studi Kasus Tentang Pemahaman Nasabah di BMT al-Amin Pekanbaru)**

**A. Konsep Akad Pada Pembiayaan Mudharabah di Bmt al-Amin Pekanbaru**

Proses pemberian pembiayaan *mudharabah* di BMT al-Amin Pekanbaru secara garis besar, proses pemberian pembiayaan dalam lima tahapan yaitu:

1. Pengajuan Pembiayaan.

Nasabah mengajukan permohonan/proposal secara tertulis kepada BMT. Proses ini dilakukan oleh petugas BMT melalui *account officer* (AO) / *account manager* (AM). Ini dilakukan setelah semua persyaratan formal dipenuhi, seperti yang menyangkut lrgalitas calon peminjam (SIUP, NPWP, akta pendirian, laporan keuangan, data diri, dsb)

2. Analisis Usulan Pembiayaan

Sementara usulan pembiayaan di proses oleh AO/AM (merupakan tugas dan wewenangnya), AO/AM mengajukan permohonan analisis kredit (pembiayaan), seperti penenilaian kelayakan usaha, penilaian jaminan, permohonan informasi calon peminjam, dan analisis yuridis ke bagian administrasi pembiayaan dan hukum. Analisis informasi yang berkaitan dengan calon peminjam juga dapat dilakukan melalui wawancara informal dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan

usaha/calon peminjam seperti tetangga, supliyer bahan baku, rekanan usaha, karyawan. Hal ini dilakukan untuk memastikan *capacity* (kemampuan) calon peminjam untuk mengembalikan pinjaman, dan menentukan nilai pinjaman yang harus diberikan oleh BMT. Proses ini merupakan proses yang paling penting bagi pihak pemberi dana (BMT), untuk memastikan keamanan dana yang diberikan serta mengurangi resiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

### 3. Persetujuan Komite Pembiayaan BMT.

Bila seluruh proses oleh AO/AM telah selesai dilakukan, dokumen yang berisi usulan pembiayaan tersebut diserahkan kebagian administrasi pembiayaan untuk diperiksa kelengkapannya. Selanjutnya di mintakan persetujuan dari komite pembiayaan. Umumnya, komite pembiayaan terdiri dari AO/AM, manajer BMT dan pengurus koperasi BMT (KBMT). Persetujuan dilakukan secara berjenjang tergantung nilai usulan pembiayaan yang diajukan oleh calon peminjam.

### 4. Pengikatan Pembiayaan

Setelah usulan pembiayaan tersebut mendapat persetujuan dari komite pembiayaan, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan pengikatan pembiayaan (akad pembiayaan). Sebelum dilakukan pengikatan, semua dokumen asli dan dokumen jaminan harus telah diterima.

### 5. Pencairan Dana

Setelah dilakukan pengikatan pembiayaan, proses pencairan dana dapat dilakukan, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi tanda tangan calon peminjam. Walaupun BMT beroperasi berlandaskan syariah,



namun siapa pun tanpa memandang unsur SARA (suku, agama dan ras), dapat menabung dan mengajukan pinjaman atau pembiayaan sepanjang memenuhi persyaratan yang ada.<sup>1</sup>

Adapun syarat pengajuan pembiayaan adalah :

#### 6. Syarat Umum

- a. Telah menjadi anggota tetap BMT al-Amin minimal 3 (tiga) bulan
- b. Telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib
- c. Membuka rekening tabungan *mudharabah* pada BMT al-Amin
- d. Bersedia menandatangani akad pembiayaan yang berazaskan syariah islam.

#### 7. Syarat Administrasi

- a. Mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dan secara lisan
- b. Melampirkan Fc. KTP, Fc KK dan Fc Jaminan.
- c. Permohonan disampaikan satu rangkap dalam map kertas warna hijau.
- d. Menyerahkan jaminan asli sebelum akad pembiayaan
- e. Membayar biaya administrasi sebesar 1,5% dari nilai pinjaman dan menyediakan materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### 8. Syarat Usaha

- a. Usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan Syariat Islam

---

<sup>1</sup> Dokumentasi BMT al-Amin Pekanbaru

- b. Nilai pinjaman disesuaikan dengan Study Kelayakan Usaha oleh pengelola BMT al-Amin.<sup>2</sup>

Adapun penyaluran dana pembiayaan *mudharabah* adalah, BMT al-Amin Marpoyan adalah salah satu BMT di Pekanbaru, yang sebagaimana BMT pada umumnya berorientasi pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Selama ini BMT al-Amin dalam kaitannya dengan nasabah, telah melakukan salah satunya penyaluran dana pembiayaan *mudharabah* pada nasabah (anggota BMT al-Amin Pekanbaru), yaitu untuk menambah modal usaha. Tujuan penyaluran dana pembiayaan *mudharabah* untuk membantu pembangunan ekonomi nasabah yang didasarkan pada prinsip syariah. Dimana lebih mengutamakan kemaslahatan demi tercapainya peningkatan kesejahteraan nasabah dan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup>

Menurut wawancara yang peneliti lakukan kepada nasabah yang menggunakan pembiayaan *mudharabah*, apakah paham dengan pembiayaan *mudharabah*, nasabah mengatakan paham dan sistem yang digunakan adalah bagi hasil, dan ketika peneliti menanyakan apakah pembiayaan tersebut sepenuhnya digunakan untuk modal usaha mereka mengatakan ya, tapi pada realitanya mereka mengatakan ya sedikitnya pasti digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif tidak sepenuhnya untuk modal usaha. Dan ini salah satu nasabah yang mengatakan bahwa ia paham tentang pembiayaan *mudharabah* akan tetapi dalam menjalankannya masih belum sesuai dengan persyaratan yang telah mereka ajukan ketika mengambil pembiayaan *mudharabah* tersebut. Adapun nasabah mengatakan kurang paham apa yang dimaksud dengan pembiayaan

---

<sup>2</sup> Brosur, syarat pengajuan pembiayaan BMT al-Amin Pekanbaru

<sup>3</sup> *ibid*

*mudharabah* dan dalam menjalankan pembiayaan tersebut masih tidak sesuai dengan persyaratan yang diajukan, mereka mengatakan setelah mengajukan pembiayaan *mudharabah* dan mendapatkan sejumlah modal sesuai dengan yang nasabah ajukan, bagaimana sistem bagi hasilnya dan bagaimana cara membuat laporan pembukuan setiap bulannya mereka tidak paham, yang mereka harapkan adalah mereka mendapatkan keuntungan dari usaha yang mereka buka tersebut.

Pengertian *Mudharabah* menurut hasil wawancara peneliti dengan karyawan BMT mengatakan bahwa, jadi yang lebih di akadkan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama dari modal yang diputar dengan pola bagi hasil/nisbah bagi hasil 30:70 . Jadi pengertian *mudharabah* secara teoritis *mudharabah* adalah kerja sama sohibul maal dengan mudharib yang mana shahibul maal menyediakan 100% modal dan mudharib yang mengelolanya resiko di tanggung oleh shahibul maal.

Realitanya di dalam BMT ini tidak sesuai dengan teoritisnya , di dalam *mudharabah* ini yg membedakan nya adalah cenderung dari gabungan *mudharabah* musyarakah bagi hasil dengan cara kerja sama dalam hal ini pembiayaan tidak 100% dari pihak BMT tapi separuh sudah milik mereka sendiri.

Dan pola akad yang di gunakan adalah pola bagi hasil, contohnya pinjaman 10 jt tapi bagi hasilnya tidak di tetapkan hanya nisbahnya saja yang diketahui yakni 30:70. Sehingga cicilan nya tidak tetap kadang bisa naik dan bisa turun, oleh karena itu harus ketat dalam pembukuan tersebut.

Dan inilah salah satu kendala yang terdapat di BMT al-Amin tersebut karena nasabah cenderung tidak bisa melakukan pencatatan laporan pencicilan setiap bulannya, sehingga pembiayaan *mudharabah* cenderung sedikit yang

mengambil pembiayaan *mudharabah* ini karena mereka merasa sulit dalam melakukan pencatatannya atau pembukuannya. Padahal lebih menguntungkan adalah pembiayaan *mudharabah*

Jadi dari segi keuntungan menjadi kecil jadinya seharusnya bisa berbagi hasil ketika besar mendapat besar tetapi ini malah kecil mendapatkannya. Karena masyarakat kadang apa bila ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar tidak mau melaporkannya ,akan tetapi jika pendapatannya kecil baru melaporkannya.

Jadi kejujuran itu sangat penting dalam pengelolaan *mudharabah* ini.

Namun kadang- karena masyarakat yang belum siap dengan pola bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ini juga membuat pihak BMT tidak mau memberikan pembiayaan *mudharabah*. Sehingga pihak BMT pun memilih aman demi menghindari kendala-kendala tersebut.

Dan menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan akan dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel IV. I**

**Tingkat Pemahaman Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah**

Jawaban nasabah	Jumlah nasabah	Persentase(%)
paham	25	67,57%
tidak	7	18,92%
Kurang paham	5	13,51%
jumlah	37	100%

*Sumber : Data olahan dari kuesioner*

Dari tabel di atas di ketahui bahwa 25 orang nasabah atau 67,57% paham dengan pembiayaan yang di tetapkan BMT. Kemudian 7 orang nasabah atau

18,92% tidak paham dengan pembiayaan yang ditetapkan BMT. Sementara 5 orang nasabah atau 13,51% kurang paham dengan pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan responden nasabah tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah paham dengan pembiayaan *mudharabah* yang telah ditetapkan di BMT

Dalam pembiayaan *mudharabah*, sebagian besar nasabah tidak memahami apa yang dimaksud dengan *mudharabah* begitu juga dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, tetapi karena kebutuhan modal maka mereka kemudian menyepakatinya;

Dari hasil penelitian ini, didapat hasil bahwa nasabah yang tidak paham tentang akad pembiayaan *mudharabah* ini juga tidak memahami bahwa akad yang dilakukan memiliki akibat hukum. Bahwa dilihat dari pendapat para ulama, bahwa ijab kabul akan memiliki akibat hukum jika memenuhi kehendak para pihak secara pasti, juga apabila tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki (*Jala'ul ma'na*). Sehingga jika para nasabah tidak memahami akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan, maka seharusnya bisa dianggap akad tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Namun selama ini didalam pelaksanaan akad di BMT, termasuk akad pembiayaan *mudharabah*, jika nasabah sudah menandatangani akad, maka berlaku seperti dalam akad di Bank Konvensional, bahwa nasabah dianggap tahu tentang akad pembiayaan *mudharabah* dan *nisbah* bagi hasilnya ;

Dalam hal ini, terlepas dari paham atau tidak pahamnya nasabah tentang isi dan maksud dari akad tersebut, tetap berlaku azas yaitu apabila ia telah menandatangani akad tersebut berarti ia dianggap mengerti dan memahami akad tersebut. Ia telah dianggap sepakat dan menyetujui akad tersebut beserta seluruh

akibat hukumnya. Akad tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan sebagai konsekuensinya menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak, yaitu bagi pihak BMT dan nasabah .

Dari penelitian diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* belum menjadi pola pembiayaan yang menarik bagi BMT. Penelitian ini memperkuat pendapat tersebut dimana nasabah pembiayaan *mudharabah* ternyata kurang paham dengan maksud pembiayaan ini, sehingga BMT sebagai *shahibul mal* mempunyai resiko yang besar dalam hal terjadi kerugian. Dengan demikian menjadikan akad pembiayaan *mudharabah* persentasenya lebih kecil dibanding dengan akad pembiayaan lain.

**Tabel IV.II**

**Keadaan Nasabah Yang Menggunakan Dana Pembiayaan Mudharabah Untuk Memenuhi Keperluan Pribadi (Konsumtif)**

Jawaban nasabah	Jumlah nasabah	Persentase (%)
Ya	15	40,54%
Tidak	7	18,92%
Kadang bila perlu	15	40,54%
Jumlah	37	100%

*Sumber : Data olahan dari kuesioner*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 15 orang nasabah atau 40,54% ya menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* untuk memenuhi keperluan pribadi (konsumtif). Kemudian 7 orang nasabah atau 18,92% menyatakan tidak, dalam menggunakan pembiayaan *mudharabah* untuk memenuhi keperluan pribadi (konsumtif). Sementara 15 orang nasabah atau 40,54% kadang-kadang kalau

sangat di perlukan menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* untuk memenuhi keperluan pribadi (konsumtif).

Berdasarkan responden nasabah tersebut dapat dikatakan bahwa dalam menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* kurang lebih digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi (konsumtif).

**Tabel IV.III**

**Keadaan Nasabah Yang Menggunakan Dana Pembiayaan Mudharabah  
Untuk Memenuhi Kebutuhan Produktif (Usaha)**

Jawaban nasabah	Jumlah nasabah	Persentase(%)
Ya	17	45,95%
Tidak pernah	8	21,62%
Kadang-kadang	12	32,43%
Jumlah	37	100%

*Sumber : Data olahan dari kuesioner*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 17 orang atau 45,95% ya, dalam menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* selalu untuk hal-hal yang produktif (usaha) kemudian 8 orang nasabah atau 21,62% menyatakan tidak pernah dalam menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* untuk hal-hal yang produktif (usaha). Sementara 12 orang nasabah atau 32,43% kadang-kadang menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* bukan untuk hal-hal yang produktif (usaha).

Berdasarkan responden nasabah tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah dalam menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* untuk hal-hal produktif (usaha)

**Tabel IV.IV**

**Keadaan Nasabah Setelah Mendapatkan Jumlah Modal Yang Diberikan  
BMT Dapat Mempengaruhi Peningkatan Hasil Usaha Yang Sedang  
Dijalankan**

Jawaban nasabah	Jumlah nasabah	Persentase (%)
Ya mempengaruhi	18	48,65%
Tidak mempengaruhi	9	24,32%
Kurang berpengaruh	10	27,02%
Jumlah	37	100%

*Sumber : Data olahan dari kuesioner*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 18 orang atau 48,65% ya, jumlah modal dari BMT dapat mempengaruhi peningkatan hasil usaha yang sedang dijalankan. Kemudian 9 orang nasabah atau 24,32% menyatakan tidak, jumlah modal yang diberikan BMT dapat mempengaruhi peningkatan hasil usaha yang sedang dijalankan. Sementara 10 orang nasabah atau 27,02% kadang-kadang jumlah modal yang diberikan BMT dapat mempengaruhi peningkatan hasil usaha yang sedang dijalankan.

Berdasarkan responden nasabah tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah modal yang diberikan BMT dapat mempengaruhi peningkatan hasil usaha yang sedang dijalankan.



Dari pengertian di atas maka akan dijelaskan tentang pemahaman nasabah pada konsep akad pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut :

### **1. Pemahaman Nasabah Pada Konsep Akad pembiayaan Mudharabah**

Nasabah yang menyatakan kurang paham mengaku sudah diberi penjelasan secara garis besar oleh pihak *shahibul m l* (BMT), tetapi mereka hanya mengerti mendapat pinjaman modal dari BMT untuk mengelola usaha, namun tidak mengerti nama dan maksud akadnya karena menurut mereka istilahnya masih awam bagi mereka.

Responden yang mempunyai umur muda, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, nasabah yang menerima pembiayaan besar, dan nasabah lama mengaku memahami penjelasan yang diberikan oleh pihak BMT mengenai maksud akad pembiayaan *mudharabah*, dimana dipahami akad pembiayaan *mudharabah* adalah suatu bentuk kemitraan, disini pihak BMT bertindak selaku penyerta modal ( *shahibul m l* ) sedangkan nasabah sebagai pengelola modal, dengan perhitungan pembagian keuntungan dari hasil usaha tersebut.

Akad *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pihak pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

**Tabel IV.V**

**Keadaan Nasabah Yang Melaksanakan Akad Pembiayaan Mudharabah**

**Tidak Dalam Unsur Keterpaksaan**

Jawaban nasabah	Jumlah nasabah	Persentase (%)
Ya	7	18,92%
Tidak	28	75.67%
Kadang-kadang	12	32,43%
Jumlah	37	100%

*Sumber : Data olahan dari kuesioner*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 orang nasabah atau 18,92% ya, melaksanakan akad pembiayaan *mudharabah* tidak dalam unsur keterpaksaan. Kemudian 28 orang nasabah atau 75,67% menyatakan tidak melaksanakan akad pembiayaan *mudharabah* dalam unsur keterpaksaan. Sementara 12 orang atau 32,43% kadang-kadang melaksanakan akad pembiayaan *mudharabah* dalam unsur keterpaksaan.

Berdasarkan responden nasabah tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah dalam melaksanakan akad pembiayaan *mudharabah* tidak dalam unsur keterpaksaan.

**Tabel IV.VI**

**Keadaan Nasabah Yang Menggunakan Dana Pembiayaan Mudharabah  
Berdasarkan Akad Yang Telah di Sepakati Bersama**

Jawaban nasabah	Jumlah nasabah	Persentase (%)
Ya	17	45,95%
Tidak	10	27,02%
Kadang-kadang	10	27,02%
Jumlah	37	100%

*Sumber : Data olahan dari kuesioner*

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa 17 orang nasabah atau 45,95% ya, menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* berdasarkan akad yang telah di sepakati bersama. Kemudian 10 orang nasabah atau 27,02% tidak sanggup memenuhi kewajiban sesuai akad yang telah disepakati bersama. Sementara 10 orang nasabah atau 27,02% kadang-kadang memenuhi kewajiban sesuai akad yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan responden tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah sanggup memenuhi kewajiban sesuai akad yang telah disepakati bersama.

**Tabel IV.VII**

**Keadaan Nasabah Yang Memahami Sistem Pengelolaan Modal**

Jawaban nasabah	Jumlah nasabah	Persentase (%)
Ya	15	40,54%
Tidak	14	37,84%
Kadang-kadang paham	18	48,65%
jumlah	37	100%

*Sumber : Data olahan dari kuesioner*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 15 orang nasabah atau 40,54% Paham dengan sistem pengelolaan modal di BMT. Kemudian 14 orang nasabah atau 37,84% menyatakan tidak tau atau paham tentang pengelolaan sistem modal di BMT. Sementara 18 orang nasabah atau 48,65% menyatakan kadang-kadang paham dengan sistem pengelolaan modal di BMT tersebut.

Berdasarkan responden nasabah tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah dapat dinyatakan kurang mengetahui bagaimana sistem pengelolaan modal pada pembiayaan *mudharabah* di BMT tersebut

Pengertian nasabah tentang sistem pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah*

Tentang sistem pengelolaan modal, 15 responden menyatakan paham sedang 14 responden menyatakan tidak paham. Sedangkan 18 responden menyatakan kadang-kadang paham. Nasabah yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi mengaku paham. Nasabah dengan jumlah pembiayaan modal besar juga mengaku paham karena pihak BMT memang lebih memantau perkembangan pengelolaan usahanya daripada nasabah dengan pembiayaan kecil. Selain itu juga nasabah yang telah lama menjadi nasabah sudah mengetahui tentang sistem pengelolaan modal dalam pembiayaan *mudharabah*.

Responden yang menyatakan paham merasa penjelasan yang diberikan oleh pihak BMT sudah cukup jelas. Bahwa didalam pembiayaan *mudharabah*, pihak nasabah sebagai pengelola modal kerja mempunyai hak kebebasan dalam mengelola modal yang diberikan, karena sistem pengelolaan modalnya 100 %

diserahkan kepada nasabah selaku *mudharib*, asal tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Hal ini menyatakan bahwa sistem pengelolaan modal didalam pembiayaan *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

Responden yang kurang paham menyatakan bahwa mereka merasa penjelasan yang diberikan oleh BMT kurang terperinci, sehingga mereka melaksanakan usahanya berdasarkan persepsi mereka sendiri. Diantara responden itu juga ada yang tidak memahami bahwa nasabah diberi kebebasan dalam mengelola usahanya. Sehingga sering timbul kekhawatiran adanya intervensi pihak BMT dalam mengelola usahanya.

Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh nasabah (*mudharib*). BMT sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan. Dalam hal ini sangat diperlukan penguasaan dan pemahaman atas karakteristik resiko usaha nasabahnya, akan semakin ketat pengawasan dan kontrol yang harus dilakukan oleh pihak BMT guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan.

## **2. Akad Pembiayaan Mudharabah**

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini kami melakukan transaksi pembiayaan *mudharabah* kepada BMT al-Amin dengan pembayaran secara angsuran. Kami berjanji akan

memenuhi kewajiban kami sebagaimana yang telah disepakati, dan demi Allah, dan dengan bersaksi Allah kami akan berbuat dengan sejujurnya atas perjanjian yang kami sepakati, semoga Allah meredhoi apa yang kami lakukan ini, Amin ya-Rabbal'alamin

### **3. Jaminan Pembiayaan Mudharabah**

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akad pembiayaan ini, dan akad pembiayaan ini tidak akan jadi, jika bagian ini tidak diadakan, maka pihak kedua (mudharib) atau penerima pembiayaan dengan menyerahkan jaminan. Maka jaminan ini dapat di pakai sebagai pengganti dari kewajibannya. BMT mendapatkan jaminan berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak contohnya: satu buah sertifikat HM/SKGR/Kendaraan untuk dapat dibebankan hak tanggungan guna kepentingan lembaga keuangan mikro syariah BMT al-Amin Pekanbaru, yang merupakan milik pemegang hak atas tanah.

## **B. Pemahaman Nasabah Tentang Perhitungan Bagi Hasil Pada**

### **Pembiayaan Mudharabah di BMT al-Amin Pekanbaru**

**Tabel IV.VIII**

#### **Keadaan Nasabah Yang Memahami Perhitungan Bagi Hasil Pada**

#### **Pembiayaan Mudharabah**

Jawaban nasabah	Jumlah nasabah	Persentase (%)
Ya	9	24,32%
Tidak	18	48,65%
Kurang paham	10	27,02%
Jumlah	37	100%

*Sumber : Data olahan dari kuesioner*

Pada umumnya nasabah sudah pernah mendengar istilah nisbah bagi hasil dalam transaksi di BMT, hanya maksud dari nisbah bagi hasil yang kadang belum dipahami. Dari hasil penelitian terdapat 10 orang yang menyatakan kurang paham mengenai nisbah bagi hasil atau 27,02%, sedang 9 responden lainnya menyatakan paham atau 24,32%, Sedangkan 18 orang yang menyatakan tidak paham atau 48,65% Responden yang kurang paham menyatakan pernah mendengar istilah nisbah bagi hasil pada saat akan melakukan akad pembiayaan *mudharabah*, tetapi maksud sebenarnya mengaku tidak tahu. Mereka mempunyai persepsi bahwa didalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada bunga dan sebagai gantinya adalah dengan cara bagi hasil. Akan tetapi bagaimana prosedur pelaksanaan nisbah bagi hasil itu, responden tersebut menyatakan kurang paham, karena yang lebih penting bagi mereka adalah mendapat pinjaman modal untuk usahanya, sedang untuk bagi hasilnya dipercayakan pada perhitungan yang dilakukan oleh pihak BMT.

Sedangkan 9 responden yang paham menyatakan bahwa bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan antara pihak BMT dan sebagai penyandang dana dengan nasabah selaku mudharib didalam pembiayaan *mudharabah*. Bagi hasil dipahami sebagai pengganti bunga yang diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan. Sehingga responden merasa lebih aman untuk bertransaksi dengan pembiayaan *mudharabah* karena bebas dari riba dalam sistim konvensional.

Menurut Gemala, pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan *shahibul m l*, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua belah pihak sepakat membagi

keuntungan tanpa mengembalikan modal. Hal ini berlaku sepanjang kerjasama masih berlangsung. Didalam prakteknya di BMT Al-Amin, jika bulan yang bersangkutan nasabah tidak mendapatkan keuntungan, maka nasabah tetap berkewajiban untuk membayar angsuran modal.

Dalam pandangan ilmu ekonomi Islam, bagi hasil merupakan prinsip pembagian untung bagi kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dengan peran serta masing-masing pihak dalam bentuk modal ataupun keahlian yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya. Oleh karenanya pengelola BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Biasanya pembiayaan *Mudharabah* dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah pasti.

Pemahaman dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil yakni pada responden yang kurang paham menyatakan tidak tahu pasti sistem yang diterapkan dalam penentuan bagi hasil dalam akad *mudharabah*. Mereka mengaku mengerti adanya penentuan prosentase bagi hasil pada saat dibacakan akad pembiayaan *mudharabah*. Pada waktu akad pihak BMT telah mempunyai standar prosentase yang ditawarkan kepada nasabah, dan responden tinggal menyetujuinya karena merasa tidak tahu prosedurnya, dan menyerahkan kepada pihak BMT untuk menentukan prosentase pembagian keuntungannya.

Responden yang paham menyatakan bahwa bagi hasil antara pihak BMT dengan nasabah ditentukan berdasarkan prosentase yang disepakati pada awal akad pembiayaan *mudharabah*. Setiap bulan jumlah bagi hasil yang diterima tidak sama besarnya karena bergantung pada keuntungan yang didapat mudharib dari



pengelolaan usahanya, yang dihitung berdasarkan laporan yang dibuat mudharib setiap bulannya.

Dalam penelitian ini juga ditemukan persepsi /pemahaman nasabah yang keliru mengenai bagi hasil. Seperti apa yang dikemukakan oleh Muhammad, bahwa nasabah menganggap bagi hasil yang diberikan oleh bank (BMT) kepada nasabah harus lebih besar dibandingkan dengan bunga dari bank konvensional, sehingga bagi hasil nasabah pembiayaan harus lebih kecil dari bunga bank.

Dalam pembagian hasil keuntungan *mudharabah*, *nisbah mudharib* dapat lebih besar atau sebaliknya lebih kecil daripada *shahibul m l* tergantung pada kesepakatan dalam akad *mudharabah*. Sebagaimana para ulama sepakat bahwa keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak (*shahibul m l* dan *mudharib*) harus dalam jumlah nisbah tertentu, jika keduanya telah sepakat bahwa seperempat (25%) atau setengah (50 %) bagi mudharib misalnya, maka hal itu sudah cukup dimengerti karena bagian sisa tentunya adalah bagi *shahibul m l*, semuanya itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, baik nisbah masing-masing sama atau lebih besar atau lebih kecil dan harus ditepati. Adapun contoh perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT al-Amin adalah :

Perhitungan bagi hasil Pada pembiayaan *mudharabah* di BMT al-Amin.

Si A diberikan pembiayaan atau modal Rp. 10.000,000,

Si A telah memiliki modal kerja Rp. 10.000,000, modal kerja si A menjadi 20.000,000 (10.000,000 milik BMT dan 10.000,000 milik nasabah).

Nisbah bagi hasil 30:70, setelah dikurangi biaya 20% dari 20.000,000 modal kerja dari penjualan barang.

Rata-rata 1.000,000 perhari penjualan dengan keuntungan rata-rata 10% perhari. Dengan penjualan rata-rata 26 hari perbulan.

Perhitungannya:

Penjualan	: 1.000,000 X 26 hari	= 26.000.000 / bulan
Keuntungan	: 10% X 26.000.000	= 2.600.000
Biaya operasional	: 20% X 2.600.000	= <u>520.000</u>
Keuntungan(sisa)	:	= 2.080.000
Bagi hak keuntungan 50% nasabah		= 1.040.000
Bagi hak 50% untuk keuntungan dengan BMT		= 1.040.000
Nisbah BMT 30%		= 312.000
Nisbah nasabah 70%		= 728.000
Cicilan sebulan		= 833.400 (pokok)
		<u>312.000</u>
		1.145.400 / bulan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan nisbah bagi hasil adalah:

a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan di nyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.

b. Bagi untung dan bagi rugi

Dalam kontrak ini tergantung dalam kinerja sektor rilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula, dan

bila laba bisnisnya kecil, maka mereka juga mendapat bagian yang kecil pula.

c. Jaminan

Penggunaan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* adalah untuk menjaga moral nasabah, bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis.

d. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah di tentukan berdasarkan pihak yang melakukan kontrak, dan akan muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*

e. Cara penyelesaian kerugian ,

Jika terjadi kerugian maka akan di selesaikan dengan cara:

- 1). Di ambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal
- 2). Bila kerugian melebihi keuntungan, baru di ambil dari pokok modal.

**C. Solusi Ketika Terjadi Kendala Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT al-Amin Pekanbaru.**

1. kendala pada pembiayaan *mudharabah*

BMT al-Amin telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, tetapi tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam operasionalnya, antara lain :

- a. Pemahaman masyarakat khususnya umat Islam yang masih keliru penilaiannya terhadap lembaga keuangan syariah.

- b. Adanya pendapat sebagian masyarakat yang menilai bunga bank konvensional itu bukan riba.
- c. Keterbatasan sumber daya insani yang profesional dan memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang lembaga keuangan syariah.
- d. Kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat pemilik dana terhadap lembaga keuangan mikro syariah, yang disebabkan tidak adanya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dari pemerintah atau Bank Indonesia.

Disamping kendala-kendala tersebut diatas, melihat perkembangan BMT al-Amin yang mengalami peningkatan yang cukup pesat, apalagi melihat potensi pasar yang terbuka luas serta mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kelebihan perekonomian dengan sistem syariah, sehingga memungkinkan BMT al-Amin berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang cukup berperan di masa depan.

Ada pun Faktor penyebab yang menjadi kendala pada pembiayaan *mudharabah* yakni :

#### 1) Faktor Dari Nasabah BMT al-Amin Pekanbaru

Ada pun faktor dari nasabah yakni menjelaskan bahwa Pengertian nasabah mengenai prosedur pembuatan laporan perkembangan usaha Dari item ini 27 responden menyatakan ada yang tidak paham dan ada yang mengatakan kurang paham, 10 lainnya menyatakan paham. Pada umumnya nasabah/responden sudah mengetahui bahwa pada akhir periode usaha, *Mudharib* harus mengembalikan modal kepada *shahibul mal* ditambah dengan sejumlah keuntungan dari hasil usaha. Besarnya keuntungan tersebut didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah

disepakati bersama sebelumnya. Besarnya keuntungan tersebut dihitung berdasar laporan bulanan yang dibuat oleh nasabah.

Responden yang menyatakan kurang paham mengaku selama ini juga telah membuat laporan mengenai perkembangan usahanya setiap bulan, namun diakui kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan diantara mereka ada yang benar-benar tidak mengerti cara perhitungannya, ada yang memang sengaja membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan alasan karena tidak mempunyai sistem pembukuan yang baik, sehingga tidak punya data keuangan yang baik.

Menurut hasil wawancara penulis dengan karyawan BMT sebagai nara sumber, pihak BMT memang tidak memberikan keharusan bagi nasabah untuk membuat laporan secara tertulis, hal ini terutama bagi nasabah dengan jumlah pembiayaan kecil. Karena mereka yang menerima pembiayaan dalam jumlah kecil sebagian besar adalah para pedagang di pasar yang pendidikannya rendah. Selain tidak bisa mereka juga beralasan malas untuk membuat laporan secara tertulis. Sehingga mereka cukup memberi laporan kepada petugas BMT secara lisan, dan petugas BMT yang akan menghitung berapa besar pembagian keuntungan yang diperoleh pada bulan itu. Disini yang diperlukan adalah kejujuran nasabah dan kepercayaan dari BMT.

Adapun bagi nasabah dengan jumlah pembiayaan yang besar, pihak BMT mewajibkan adanya laporan secara tertulis dan tertib. Pihak BMT juga mengharuskan adanya catatan pembukuan yang tertib dan terperinci tentang keuntungan yang diperoleh dalam pengelolaan usaha tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan pembayaran kembali dari nasabah. Oleh

karena itu maka administrasi atas segala transaksi penjualan dan pendapatan usaha diupayakan setransparan dan serapi mungkin. Mengingat pencatatan tersebut nantinya akan menjadi dasar ketika melakukan perhitungan bagi hasil.

Menurut peneliti, *Mudharabah* memang sebuah kerjasama yang membutuhkan kejujuran total dari kedua belah pihak terlebih bagi *mudharib*. Kejujuran yang dimaksud meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan usaha dan pelaporan hasil usahanya.

yang disebut dengan *mudharabah*. Keuntungan adalah milik bersama antara *shahibul mal* dan *mudharib*, karena modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan, dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing.

**Tabel IV.IX**

**Keadaan Nasabah Yang Memahami Prosedur Pembuatan Laporan  
Perkembangan Usaha Setiap Bulan.**

Jawaban nasabah	Jumlah nasabah	Prsentase(%)
Ya	10	27,02%
Tidak	18	48,65%
Kadang-kadang paham	9	24,32%
jumlah	37	100%

*Sumber : Data olahan dari kuesioner*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 10 orang nasabah atau 27,02% ya mengetahui prosedur pembuatan laporan perkembangan usaha setiap bulan. Kemudian 18 orang nasabah atau 48,65% menyatakan tidak, dalam menggunakan pembiayaan *mudharabah* tidak mengetahui prosedur pembuatan laporan

perkembangan usaha setiap bulannya. Sementara 9 orang nasabah atau 24,42% kadang-kadang mengetahui prosedur pembuatan laporan perkembangan usaha setiap bulannya, atau sedikit paham dengan pembuatan prosedur laporan perkembangan usaha setiap bulannya.

Berdasarkan responden nasabah tersebut dapat dikatakan bahwa kurang begitu paham dengan cara pembuatan laporan/pembukuan pada perkembangan usaha mereka setiap bulannya, sehingga ketika responden ingin melakukan bagi hasil mereka bingung sendiri berapa yang harus di berikan kepada pihak BMT tersebut. Jadi pada pembiayaan *mudharabah* ini sngat sedikit nasabah yang yg berminat untuk mengambil pembiayaan ini, dikarenakan tidak mengertinya nasabah pada pencatatan atau pembuatan laporan usaha perkembangannya setiap bulannya.

BMT al-amin mengatakan bahwa kendalanya di pencatatan, rata-rata mereka tidak bisa mencatat atau masyarakat tidak mau, sehingga ketika ingin melakukan bagi hasil mereka tidak tau bagaimana pola bagi hasil mereka. Sehingga persentase pada pembiayaan *mudharabah* ini sangat kecil.

## 2) Faktor Dari BMT al- Amin Pekanbaru

Faktor dari BMT al-Amin ini sendiri adalah Faktor eksternal yaitu penjelasan dari pihak BMT memegang peran yang sangat penting. Karena dari faktor inilah nasabah yang biasanya masih awam mulai diperkenalkan mengenai pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasil. Disini faktor internal yang mempengaruhi adalah faktor usia, pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah pembiayaan, jenis kelamin dan lama menjadi nasabah

2. Solusi Penyelesaian kendala pada pembiayaan *mudharabah*.

**Tabel IV.X**

**Keadaan Nasabah yang Memahami Bagaimana Solusi Ketika Terjadi  
Kendala Pada Pembiayaan Mudharabah**

Jawaban nasabah	Jumlah nasabah	Persentase(%)
Paham	7	18,92%
Tidak maham	18	48,65%
Kurang paham	12	32,43%
jumlah	37	100%

*Sumber : Data olahan dari kuesioner*

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa 7 orang nasabah atau 18,92% Paham bagaimana cara yang di tempuh jika terjadi kendala/perselisihan di BMT. Kemudian 18 orang nasabah atau 48,65% menyatakan tidak mengetahui atau tidak paham tentang bagaimana cara mengatasi kendala /perselisihan di BMT. Sementara 12 orang nasabah atau 32,43% menyatakan kadang-kadang paham dengan bagaimana cara mengatasi kendala /perselisihan di BMT tersebut.

Berdasarkan responden nasabah tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah dapat dinyatakan kurang mengetahui bagaimana cara yang di tempuh jika terjadi kendala/perselisihan pada pembiayaan *mudharabah* di BMT tersebut.

Penyelesaian perselisihan dalam Hukum Perikatan Islam pada prinsipnya boleh dilakukan dengan 3 jalan, yaitu :

- a. *Shulhu* ( jalan perdamaian).

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua pihak.



Dalam fiqh pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.<sup>4</sup> Disini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total ataupun penyerahan keputusan kepada pihak ketiga.<sup>5</sup>

Perdamaian (*shulhu*) disyariatkan berdasarkan Al-Quran (QS. 49:9), Sunnah dan Ijma'. Umar ra pernah berkata : “ Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena keputusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka”.<sup>6</sup>

#### b. *Tahkim (jalan arbitrase)*

Istilah tahkim secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis tahkim berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini, hakam ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Aktivitas penunjukan itu disebut tahkim, dan orang yang ditunjuk itu disebut hakam (jamaknya hukum). Penyelesaian yang dilakukan oleh hakam pada abad modern ini disebut dengan arbitrase.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> A.T. Hamid, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan* (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1983) h. 135.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 12, terjemahan oleh H. Kamaluddin A.M, (Bandung, PT. Al Ma'arif, 1988), h. 190.

<sup>7</sup> Gemala Dewi, *Hukum*, h. 91.

b. *Al-Qadha* (Proses Peradilan).

*Al-Qadha* secara harfiah antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara atau masalah keperdataan, termasuk didalamnya Hukum Keluarga, dan masalah tindak pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan qadhi (hakim).<sup>8</sup>

#### A. Tinjauan Ekonomi Islam Pada Pembiayaan Mudharabah

sistem ekonomi islam adalah bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak tepisahkan dengan aspek-aspek yang lain dari keseluruhan ajaran-ajaran islam yang komprehensif dan integral.<sup>9</sup> Dasar pemberlakuan sistem ekonomi islam adalah Firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 208:



"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

sedangkan yang berkaitan dengan muamalah, terdapat dalam surat al-baqarah ayat 282:

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Tazkia Institut, *Ekonomi islam*, (jakarta: Tazkia, 2003), h. 6.

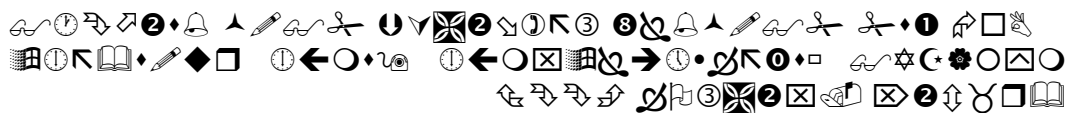


"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis"

Prinsip ekonomi islam (syariah) adalah keadilan, kebersamaan dan tolong menolong, saling mendorong dalam meningkatkan prestasi yang didasarkan kepada dokterin tauhid. Sehingga, dalam muamalah, penekanan, ketidakadilan, dan individualistis, dihilangkan. Dalam ekonomi islam, hubungan pinjam meminjam tidak dlarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungansaling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika yangdigariskan oleh islam.<sup>10</sup>

Dalam hukum keredit (pembiayaan) dalam islam dibolehkan sebagian Firman Allah SWT tentang kredit (pembiayaan) adalah:

firman allah dalam surat Al-Hadid ayat II tentang pinjaman yang berbunyi:



“ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (jakarta: gema Insani, 2000) cet. Ke-1, h. 170

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, (semarang : CV. Asy-syifa', 1998) Cet. Ke-1, h. 430

Akan tetapi, jika pemilik dana ingin berbisnis baik melalui jual beli, sewa, bagi hasil, dan lain-lain, sangat dianjurkan apabila dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada mudharat yang ditimbulkannya, dimana pada dasarnya hukum segala dalam muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan yang dilarang dalam islam adalah pematokan imbalan pada awal secara tetap dan keuntungan yang dipastikan dimasa depan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, Cet. Ke-I, h. 15

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa :

1. Problematika yang ditemui pada baitul maal wattamwil (BMT) al-Amin

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dalam menerpkan konsep akad pada pembiayaan *mudharabah* adalah masih cukup banyaknya nasabah BMT al-Amin malas membuat laporan keuangan atau neraca usaha dimana kewajiban tersebut sebenarnya buka sebatas kebijakan dari pihak BMT al-Amin bagi nasabah yang mendapat pembiayaan *mudharabah*.

pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada 6 hal yang dijadikan tolak ukur penelitian oleh peneliti dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan *mudharabah* dan bagaimana konsep akad pada pembiayaan *mudharabah*, pemahaman mengenai kewajiban membuat laporan perkembangan hasil usaha nasabah setiap bulan, pemahaman mengenai sistem pengelolaan modal, pemahaman mengenai perhitungan penentuan bagi hasil, dan pemahaman bagaimana solusi yang ditempuh jika terjadi kendala.

2. Bahwa adanya ketidak pahaman nasabah mengenai maksud dan prosedur dalam akad pembiayaan *mudharabah* ini menurut peneliti bisa menimbulkan kendala antara pihak BMT dengan nasabah. Hal ini dikarenakan ketidak pahaman nasabah akan menimbulkan perbedaan persepsi antara pihak BMT sebagai *shahibul maal* dengan pihak nasabah selaku *mudharib*.

3. Bahwa tidak semua nasabah mengerti mengenai prosedur penyelesaian apabila terjadi kendala antara pihak BMT dengan nasabah. Sebagian nasabah tidak memahami bahwa akad yang dilakukan menimbulkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak. Sebagian nasabah mempunyai persepsi bahwa penyelesaian kendala cukup hanya dengan jalan damai saja seperti yang dilakukan selama ini, dan tidak memperhatikan bahwa didalam akad telah pula disebutkan bahwa penyelesaian kendala dilakukan di Pengadilan Agama.

sedangkan jika ditinjau menurut ekonomi islam, pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu sistem ekonomi islam yang mengedepankan nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan tersebut terdapat pada sistem bagi hasil yang dianut oleh BMT al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*.. Selain nilai-nilai keadilan yang tentu tanpa paksaan diantara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), dalam pembiayaan *mudharabah* ini diperlukan juga nilai kejujuran, dalam hal ini kejujuran dari *mudharib* untuk mencatat

seluruh keuntungan (termasuk kerugian) usaha setiap hari dan melaporkannya kepada shahibul maal.

## **B. Saran-saran**

1. Bahwa dalam memberikan suatu layanan pembiayaan *mudharabah* dengan suatu akad, pihak BMT perlu lebih meningkatkan atau mengintensifkan dalam menjelaskan maksud akad tersebut, termasuk mengenai prosedur pengelolaan modalnya, pembuatan laporannya, dan juga pengertian bagi hasilnya secara lebih terperinci, sehingga lebih memudahkan bagi nasabah untuk melakukan hak dan kewajibannya dengan benar. Bisa juga diberikan tambahan fasilitas pendampingan / bimbingan bagi nasabah yang membutuhkan.
2. Bahwa perlu lebih disosialisasikan bahwa akad yang dilakukan mempunyai konsekuensi hukum, dimana apabila ada kendala, jika jalan damai tidak diperoleh kesepakatan, maka sesuai akad yang sudah disepakati, bisa diselesaikan melalui jalur hukum yaitu melalui Pengadilan Agama.

Ditinjau dari ekonomi islam, model pembiayaan *mudharabah* ini perlu ditumbuh kembangkan sedemikian rupa sehingga masyarakat kecil dapat terbantu perekonomiannya dengan hadirnya sistem ekonomi islam yang menitik beratkan pada bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Jaziri, *Kitab al- fiqh 'ala mazahib al- Arba'ah*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990).
- Ahmad, Az Zarqa Musthafa, *al fiqh fi Tsubih al Jadi* (Beirut, Dar-al Fikr,1989).
- A Mas'adi, Ghuftron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet.1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2002).
- Ali wardana, S.E.I (karyawan), BMT al- Amin Pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2012.
- Al-Dasuqi, *Hasiyah al-Dasuqi'ala al-Sarh al-Kabir*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr,1989),
- Al-Nawawi, *Riyad al-Salihin*, Vol.IV, (Beirut : Dar al-Fikr,tt)
- Al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina,Vol.II, (Beirut : Dar al-Fikr,tt)
- Al-Mu'j m al-Wasit, *Al-juz' al-awwal*, Cet III, (Kairo, Majma' al-lughah al-Arabiyah), 1972.
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Penerjemah. M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Ascarya , *akad & produk bank syariah*, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007 Cet. Ke-12003)
- BMT al-Amin pekanbaru, *Dokumentasi sejarah BMT al-Amin*
- Depertemen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, (semarang : CV. Asy-syifa', 1998) Cet. Ke-1
- Hafiz Abi Abdullah Muhammad Ibni Yajid Qajwiyani, *Sunan Ibnu Majah Jilid II, Kitab At-Tijarah No. 2289 Bab Syirkah Wa Mudharabah* , (Bairut : Muhammad Fuad Abdul Bapi Juz II, 207-285 H). Cet. ke-2
- Himpunan fatwa dewan syariah nasional untuk lembaga keuangan syariah (jakarta 2001, edisi pertama)
- Ibrahim, M. Anwar. “*Konsep Profit dan Loss Sharing System Menurut Empat Madzhab*”..



Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Cet.1, Yogyakarta, UII Press, 2002.

Ibn. Abidin, *Radd al-Mukht r 'ala al-Durr al Mukht r*, juz IV, (Beirut: Dar Ihya al-Turas, 1987)

Karim ,Adiwarman, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, IIIT Indonesia, 2003) .

-----, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-3

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet.3, (Jakarta : PT Gramedia, 1977),

Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, (yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002, Edisi Revisi.

*Mudharabah* disebut juga *qiradh* atau *muqaradah*. Makna keduanya sama.

*Mudharabah* adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah *qiradh* digunakan oleh masyarakat Hijaz. (Adiwarman A Karim, 2004, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 2, PT Raja Grafindo, Jakarta).

Nurmala , S.Ag (manager), BMT al-Amin pekanbaru, wawancara, pekanbaru tanggal 8 maret 2013.

Republika Online tanggal 14 Desember 2001.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, Yogyakarta, UII Press, 2004

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. 2, Yogyakarta Ekonisia, 2004.

Syafi'i Antonio, Muhamad, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Tazkiah Cendikia, 2001).

Sayyid Sabbiq, *Fiqus Sunnah* (Terjemahan), Bandung, Al Maarif

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta, Djambatan, 2001).

Wirdyaningsih, *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, Ed.I.Cet. 1, Jakarta, Kencana, 2005

Wawancara dengan Karyawan bmt al-amin ali wardana

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989)

Zulkifli ,Sunarto , *Panduan Praktis Transaksi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, Cet. Ke-I